



Buletin Parlementaria

Nomor 1162/II/VIII/2021 • Agustus 2021

Vaksinasi di DPR Dukung Percepatan Kekebalan Kelompok



**3 DPR Minta
Pemerintah
Percepat Vaksinasi
Seluruh Indonesia**



**5 Satgas Lawan Covid-19
DPR Donasikan Sejuta
Masker untuk Nakes**



9 772614 339005



BULETIN

Vaksinasi di DPR Dukung Percepatan Kekebalan Kelompok



Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso meninjau vaksinasi di lingkungan DPR RI. Foto: Kresno/Man

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi di lingkungan DPR RI. Menurut Agung, pelaksanaan vaksinasi periode kedua di DPR RI ini dalam rangka mendukung pemerintah untuk percepatan pembentukan kekebalan kelompok (*herd immunity*), serta mencegah kerumunan di beberapa titik di Jakarta karena antusiasme tinggi masyarakat untuk mendapatkan vaksin akhir-akhir ini.

“Kita lihat pelaksanaan vaksinasi di Jakarta maupun di daerah,

banyak yang *berjubel*, sehingga ada kerumunan. Nah DPR ini memberikan solusi memberikan kesempatan kepada Anggota DPR yang belum dan tentunya para pegawai di lingkungan Setjen DPR RI agar dapat vaksin. Tentunya agar seluruh masyarakat Indonesia dapat divaksin,” ujar Agung saat meninjau vaksinasi di Ruang Pustakaloka, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/8).

Agung menjelaskan vaksinasi menggunakan vaksin jenis Sinovac ini sudah dimulai sejak Senin (2/8), dan akan berlangsung hingga Minggu (8/8), dengan capaian vaksinasi per

harinya rata-rata sebesar 200 dosis. Padahal, tambah Agung, para tenaga kesehatan Pelayanan Kesehatan (yankes) DPR dan Rumah Sakit Kesdam Jaya Cijantung, masing-masing telah menyiapkan 600 dosis vaksin per harinya.

“Pendaftarannya bisa dilakukan secara daring atau bisa langsung hadir ke sini di Pustakaloka. Mungkin, karena masih dalam reses jadi banyak yang belum bisa hadir,” tambah politisi Partai Demokrat ini.

Agung mengakui, jika dalam evaluasi target vaksinasi tidak tercapai, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk membuka vaksinasi tersebut bagi masyarakat umum. Tentunya, dengan perubahan aturan yang lebih fleksibel namun tetap dalam pengawasan keamanan dan protokol kesehatan yang ketat.

“Kalau kita lihat pelaksanaan di GBK (Gelora Bung Karno) sangat antre, karena antusias yang tinggi, *kan* kasian. Bagaimana kalau ini juga untuk umum agar bisa vaksin di DPR sebagai rumah rakyat. Anggota Dewan sebagai representasi rakyat harus punya empati kepada rakyat,” tegas Agung.

Dengan adanya vaksinasi di DPR ini, Anggota Komisi III DPR RI tersebut berharap Indonesia dapat segera mencapai kekebalan komunal, yaitu 70-80 persen warganya sudah mendapatkan vaksinasi. Sehingga, kehidupan masyarakat Indonesia bisa kembali normal dengan kondisi kesehatan yang lebih kuat.

“Saya sebagai Ketua BURT sangat mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan, masyarakat Indonesia segera dapat divaksin semua. Target *herd immunity* tercapai, sehingga kekebalan tubuh rakyat Indonesia semakin kuat, dan kehidupan bisa kembali normal bukan *new normal*,” tutup legislator dapil Jawa Barat I tersebut. ■ rdn/sf

DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Seluruh Indonesia



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: Kresno/Man

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta pemerintah menjamin ketersediaan vaksin, mempercepat vaksinasi ke seluruh wilayah Indonesia, sembari tidak kendor melakukan pemeriksaan, pelacakan dan perawatan serta isolasi terhadap setiap temuan kasus baru Covid-19. Ia pun meminta pemerintah terus menjaga dan meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia.

Fokus pemerintah diminta tak lagi tertuju ke Pulau Jawa dan Bali saja. "Jangan sampai lonjakan kasus yang pernah terjadi di Jawa dan Bali terjadi di luar Pulau Jawa dan Bali yang fasilitas dan layanan kesehatannya

lebih terbatas," papar Puan dalam keterangan pers yang diterima *Parlementaria*, Selasa (3/8).

Puan juga meminta pemerintah menjamin hak tenaga kesehatan (nakes) tidak terlanggar dan benar-benar terpenuhi. "Mereka adalah pelaksana terdepan penanganan pandemi. Pastikan hak mereka terpenuhi, termasuk pembayaran insentifnya," ujar Menko PMK periode 2014-2019 ini.

Untuk memastikan semua langkah pemerintah menangani pandemi benar-benar efektif,

Puan juga mengingatkan lagi soal pentingnya kepercayaan rakyat di tengah situasi sulit ini. "Jaga kepercayaan rakyat. Pastikan PPKM yang membatasi mobilitas dan kegiatan rakyat diimbangi dengan perlindungan hidup yang adalah hak asasi rakyat. Jangan terjadi lagi kasus-kasus pungli atas hak rakyat," tegas Puan.

Puan juga meminta vaksinasi benar-benar dikawal dan dipercepat penyelesaian targetnya. Terlebih lagi, saat ini belum ada obat yang bisa mengobati penyakit ini. "Yang bisa kita lakukan adalah mencegah penularan, mengurangi keparahan saat terpapar, dan mencegah kematian. Vaksin adalah perlindungan terbaik kita untuk saat ini. Negara harus hadir dengan memastikan ini segera terlaksana sesuai target," pungkas Puan. ■ eko/es



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindy, S.Sos, Ertangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianty, S.I.Kom, Rahayu Setyawati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus

FOTOGRAFER

Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno P.D. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldi Opie, Hasri Mentari

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Annanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO

DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Kemenangan Greysia-Apriyani, Bukti Sejarah Prestasi Perempuan Indonesia

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya bagi pasangan Greysia Polii dan Apriyani Rahayu yang telah mempersembahkan medali emas dari cabang bulu tangkis nomor ganda putri di Olimpiade Tokyo 2020 lalu.

“Selamat Greysia dan Apriyani! Kalian benar-benar membuktikan ketangguhan perempuan Indonesia dalam berjuang hingga titik akhir,” ujar Puan dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (2/8). Puan mengakui kekuatan mental pasangan ini yang secara catatan prestasi bahkan sempat dianggap tidak melebihi lawannya.

Apalagi secara usia juga tidak semuda lawannya. “Mental yang teruji, tidak terintimidasi. Saya benar-benar bangga pada kalian, Greysia-Apriyani. Terima kasih telah menebarkan semangat dan harapan bagi seluruh bangsa di tengah situasi pandemi yang sangat butuh kabar-kabar baik seperti ini,” kata Puan.

Seperti diketahui, Greysia-Apriyani di laga final mengalahkan pasangan Qing Chen Chen/Yi Fan Jia dari China, dengan kemenangan dua set langsung 21-19 dan 21-15. Pasangan Merah Putih ini menempati peringkat keenam bulutangkis dunia, sementara lawannya ada di posisi tiga.

Sempat tertinggal di awal babak pertama, Greysia-Apriyani memperlihatkan kekuatan mental bertanding mereka dengan melaju hingga angka terakhir yang memastikan medali emas bagi Indonesia dengan dua set langsung.



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: Kresno/Man

“Prestasi Greysia-Apriyani ini sekali lagi adalah bukti sekaligus pelecut bahwa Indonesia tidak pernah kekurangan generasi baru dan penerus tradisi emas. Ini juga membuktikan atlet

perempuan kita di ajang dunia tidak bisa dipandang sebelah mata,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Di tengah pandemi dan tantangan berat yang dihadapi para perempuan di seluruh Indonesia, prestasi Greysia-Apriyani ini menurut Puan, sebagai sebuah kabar baik yang sangat membanggakan dan membesarkan hati.

Dalam sejarah bulu tangkis di olimpiade, prestasi ganda putri Greysia-Apriyani adalah capaian pertama bagi Indonesia. Bahkan, laga final Greysia dan Apriyani pun sudah merupakan satu sejarah tersendiri. Sebelumnya, prestasi tertinggi pasangan ganda putri Indonesia di Olimpiade adalah babak perempat final. ■ dep/es

”

**SELAMAT GREYSIA DAN
APRIYANI! KALIAN BENAR-
BENAR MEMBUKTIKAN
KETANGGUHAN
PEREMPUAN INDONESIA
DALAM BERJUANG
HINGGA TITIK AKHIR,**

Satgas Lawan Covid-19 DPR Donasikan Sejuta Masker untuk Nakes



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima donasi satu juta masker dari PT Hetzer Medical Indonesia. Foto: Runi/Man

Satgas Lawan Covid-19 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad menerima donasi satu juta masker dari PT Hetzer Medical Indonesia yang akan didistribusikan kepada para tenaga kesehatan yang saat ini menjadi garda terdepan penanganan pandemi Covid-19 di seluruh rumah sakit di Indonesia.

“Kami bekerja sama dengan PT Hetzer Medical Indonesia membagikan

masker sebanyak satu juta untuk dibagi-bagikan kepada nakes. Bantuan ini diserahkan oleh Satgas Lawan Covid-19 DPR RI,” ujar Dasco di selasar Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/8).

Dasco juga berterima kasih kepada seluruh jajaran direksi PT Hetzer Medical Indonesia yang telah ikut berpartisipasi dalam upaya pemberantasan Covid-19 di Indonesia. “Semoga sumbangan ini betul-betul dapat bermanfaat dan bisa sampai kepada yang membutuhkan,” lanjut

politisi Partai Gerindra tersebut.

Sementara itu, perwakilan PT Hetzer Medical Indonesia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Tim Satgas Lawan Covid-19 atas kesempatan untuk diikutkan berpartisipasi dalam rangka menghapus Covid-19 di Indonesia.

“Saya mewakili PT Hetzer berterima kasih pada Satgas Lawan Covid-19 atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Semoga amanah ini dapat kami sampaikan dengan baik,” jelasnya. ■ **er/es**

Sufmi Dasco: Pedagang Pasar Tanah Abang Antusias Ikut Vaksinasi



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Satgas Lawan Covid-19 DPR RI meninjau vaksinasi bagi pedagang di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Foto: Oji/Man

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Satgas Lawan Covid-19 DPR RI meninjau vaksinasi bagi para pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jakarta. Dirinya mengaku senang melihat antusiasme pedagang yang tengah mengikuti proses vaksinasi yang diselenggarakan oleh IKAPPI bekerjasama dengan Polri tersebut.

“Pada hari ini kami meninjau vaksinasi yang diselenggarakan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) dan Polri. Vaksinasi di sini sudah rencanakan di DPR beberapa waktu lalu,” ungkap Dasco yang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi

IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena dan Anggota Komisi III DPR RI Habiburrahman di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (30/7).

Memasuki hari ketiga, antusiasme para pedagang untuk mendapatkan vaksinasi masih tinggi. “Pedagang menyatakan bahwa mereka tidak ingin menyerah apalagi mengibarkan bendera putih. Mereka ingin vaksinasi supaya bisa terus melanjutkan roda perekonomian dan menang lawan Covid-19,” tandas Dasco.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menyarankan kepada pengelola pasar supaya kuota vaksinasi hariannya ditambah. Hal tersebut ditunjukkan dengan animo yang besar pedagang

dari blok lain juga masih meminta penambahan hari untuk vaksinasi.

Sementara itu, Ketua Umum IKAPPI Abdullah Mansuri menyebut target vaksinasi di DKI Jakarta adalah sebanyak 100 ribu vaksin, dan itu sudah berjalan di Jakarta Timur. Kemudian di Pasar Tanah Abang target vaksinasi diharapkan akan menasar hingga 20 ribu pedagang.

“Antusias pedagang (memperoleh vaksinasi) cukup besar, akan menasar 20 ribu pedagang. Ini fase yang kesekian kali, tapi berkat kerja sama dengan semua pihak Alhamdulillah hari ketiga ini berjalan dengan lancar,” pungkas Abdullah kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI. ■ oji/es

Raih Emas Olimpiade Tokyo, Gus Muhaimin: Terima Kasih Greysia- Apriyani, Kalian Luar Biasa!

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengucapkan selamat kepada pasangan bulutangkis ganda putri Indonesia, Greysia Polii-Apriyani Rahayu yang sukses meraih medali emas di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Menurutnya, capaian dari duet pebulutangkis tersebut membuat bangga seluruh masyarakat Indonesia.

“Selamat untuk Greysia Polii-Apriyani Rahayu. Luar biasa, perjuangan yang hebat dan melelahkan tentunya. Tapi sudah mengharumkan nama Indonesia,”

ungkap Gus Muhaimin dalam keterangan resminya yang diperoleh **Parlementaria**, Senin (2/8/2021). Hal itu menjadi momen bersejarah pada dunia perbulutangkisan Indonesia.

“Ini sejarah bagi ganda putri kita, Greysia-Apriyani, sebagai ganda putri

Indonesia pertama yang

mampu tampil di final Olimpiade dan menang. Sekali lagi terimakasih Greysia dan Apri, Indonesia sungguh bangga kepada kalian,”

tutur politisi Fraksi PKB itu. Sekadar informasi, Greysia-Apriyani sukses mengalahkan ganda putri China, Chen Qingchen-Jia Yi Fan dalam dua gim

langsung, 21-18 dan 21-12.

Pertandingan itu berlangsung ketat di babak awal, namun ketenangan ganda putri Indonesia mampu meredam laju heroisme ganda China. Di set kedua, ganda putri Indonesia nampak begitu leluasa menguasai jalannya pertandingan. Pasangan China terlihat kerap membuat kesalahan sendiri dan mampu dimanfaatkan dengan apik oleh Greysia-Apriyani hingga akhirnya menang telak 21-15.

Duet maut Greysia-Apriyani sukses membuat kejutan sejak awal dipasangkan dengan berhasil keluar sebagai juara Thailand Open Grand Prix Gold 2017 mengalahkan wakil tuan rumah, Chayanit Chaladchalam-Phataimas Muenwong, dalam dua gim langsung, 21-12 dan 21-12, dalam durasi 45 menit.

Lagi-lagi Greysia dan Apriyani membuat kejutan dengan menjuarai turnamen French Open Super Series 2017. Masih pada tahun yang sama, Greysia-Apriyani tetap bersyukur dengan posisi runner up dalam Hong Kong Open Super Series 2017.

Pada tahun berikutnya, Greysia-Apriyani juga harus puas menjadi *runner up* Indonesia Masters 2018, setelah kalah pada babak final dari pasangan asal Jepang, Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi. Kini, tahun 2021, duet pasangan kebanggaan Indonesia ini kembali membawa bendera Merah Putih berkibar pada Olimpiade Tokyo 2020 dengan mengalahkan pasangan ganda putri China. ■ ah/ves



Wakil Ketua DPR RI
Abdul Muhaimin Iskandar.
Foto: Nadia/Man

Tunda Migrasi TV Digital, Jangan Tambah Beban Rakyat

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono berharap agar pelaksanaan migrasi dari TV analog ke TV digital oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ditunda sementara waktu, sampai dengan serangan pandemi Covid-19 ini mereda. Ia meminta Kominfo lebih mengutamakan kepentingan masyarakat banyak, utamanya warga dari kalangan menengah ke bawah.

“Sebaiknya ditunda saja dulu, setidaknya sampai dengan pandemi Covid-19 mereda. Banyak masyarakat di kalangan bawah menjerit karena berbagai pembatasan akibat lonjakan kasus Covid-19 yang berdampak terhadap penghasilan dan perekonomian mereka. Jangan menambah beban dan kesulitan rakyat dulu lah,” tegas Bambang dalam keterangan persnya, Rabu (4/8).

Ia memahami tahap migrasi TV analog ke digital ini memang perlu dilakukan untuk menghemat penggunaan frekuensi agar bisa dialihkan kepada layanan telekomunikasi, termasuk penyelenggaraan layanan 5G. “Namun pemerintah juga semestinya harus mempertimbangkan *timing* dalam proses pelaksanaannya,” ungkapnya.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini memaparkan, Kominfo akan melaksanakan *Analog Switch Off* (ASO) dengan tujuan untuk menata pita frekuensi 700 Mhz yang selama ini dipakai oleh penyelenggara TV analog. Untuk migrasi, diperlukan perangkat *Set Top Box* (STB) agar memudahkan masyarakat dalam mendapatkan siaran TV digital, jika TV yang mereka miliki masih berbentuk tabung atau TV analog.

Harga STB yang diperlukan untuk TV tabung agar bisa mendapat siaran TV digital berkisar Rp195 ribu sampai dengan Rp375 ribu, jumlah yang cukup signifikan bagi masyarakat di kalangan bawah. Meski Kominfo menyiapkan subsidi perangkat STB gratis bagi keluarga miskin, tapi Bambang menilai bahwa hal tersebut juga bukan merupakan solusi yang ideal.

“Alangkah lebih baiknya apabila anggaran tersebut dialokasikan untuk program-program penanganan pandemi Covid-19, termasuk bantuan kepada masyarakat. Saya pikir Kominfo juga perlu mempertimbangkan bahwa penyaluran STB ini juga membutuhkan waktu. Padahal keberadaan TV saat ini penting sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang aktivitasnya dibatasi,” terang Bambang lebih lanjut.

Wakil Rakyat dapil NTB II ini pun menggarisbawahi komitmen dari penyelenggara *multipleksing* yang ingin membantu subsidi perangkat

STB. Namun dirinya meragukan subsidi yang dijanjikan Kominfo bisa diberikan secara merata kepada seluruh keluarga miskin. Ia menyarankan agar Kominfo fokus dulu saja terhadap sosialisasi kepada masyarakat mengenai migrasi TV analog ke digital ini.

Karena tidak sedikit masyarakat yang belum paham, bahkan yang salah paham dan mengira bahwa perpindahan dari sistem TV analog ke digital itu membutuhkan akses internet sehingga mereka ketakutan tak bisa menonton TV lagi. “Dengan sosialisasi dan persiapan yang matang dari Kominfo, kekhawatiran terjadinya kegaduhan akibat dari migrasi TV analog ke digital akan bisa dihindari,” pungkasnya. ■ es

Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Bambang Kristiono.
Foto: Jaka/Man



Digitalisasi Siaran TV, Legislator Minta Kominfo Tidak Tergesa-gesa

Anggota Komisi I DPR RI Rachel Maryam Sayidina menilai pelaksanaan analog *switch off* dalam program digitalisasi yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), memberikan dampak yang baik terhadap kualitas siaran yang lebih stabil. Namun, program digitalisasi ini membutuhkan persiapan dan kesiapan secara matang baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat.

“Program siaran digitalisasi ini haruslah dipersiapkan dengan matang, tidak boleh tergesa-gesa, terutama dalam hal pengadaan dan pendistribusian perangkat alat bantu berupa *set top box* (STB) yang dijanjikan pemerintah akan dibagikan ke masyarakat secara gratis,” kata Rachel dalam keterangan tertulisnya kepada **Parlementaria**, Selasa (27/7).

Sebagaimana diketahui, nantinya Kominfo akan mematikan semua siaran TV analog dan beralih ke TV digital dengan rencana target rampung pada November 2021. Penghentian siaran TV analog akan dilakukan dalam lima tahap. Dan tahap pertama ditargetkan rampung paling lambat 17 Agustus 2021.

Rachel juga mempertanyakan sejauh mana langkah pemerintah dalam menyiapkan perangkat pendukung siaran digitalisasi ini. Ia tak yakin jika program tersebut dapat optimal dilakukan ditengah kondisi pandemi. “Tentunya harus dilihat sejauh mana langkah pemerintah dalam mempersiapkan perangkat pendukung siaran digitalisasi untuk masyarakat,” terang politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Selain itu, lanjut Rachel, perlu dipertimbangkan juga sejauh mana kesiapan masyarakat menerima siaran digitalisasi dalam kondisi pandemi saat ini. “Masyarakat tengah terpuruk secara

”

PROGRAM SIARAN DIGITALISASI INI HARUSLAH DIPERSIAPKAN DENGAN MATANG, TIDAK BOLEH TERGESA-GESA

kesehatan dan ekonomi. Kalau ditambah program digitalisasi yang mengharuskan masyarakat membeli TV digital atau menunggu *set top box* dari pemerintah yang belum jelas kapan sampai di rumah mereka, maka ini akan menjadi beban tambahan masyarakat,” jelas legislator dapil Jawa Barat II tersebut.

Menurutnya, TV merupakan salah satu media hiburan utama bagi masyarakat terutama pada kondisi pandemi saat ini dimana masyarakat didalam rumah sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19. “Jika hal ini dilaksanakan secara tergesa-gesa tanpa persiapan yang matang, maka akan berpotensi terhadap terputusnya hak masyarakat untuk dapat mengakses hiburan didalam rumah, mengingat saat ini mayoritas masyarakat masih menggunakan TV analog,” imbuh Rachel.



Anggota Komisi I DPR RI Rachel Maryam Sayidina. Foto: Andri/Man

Sementara itu, kata Rachel, sejauh ini belum ada pembahasan dengan Komisi I DPR RI terkait skema penyaluran *set top box*. Sehingga, perlu menjadi perhatian, jangan sampai penyalurannya tidak merata ke masyarakat. Sementara pemerintah telah mewacanakan akan mematikan siaran TV analog beralih ke digital hingga November 2021.

“Apabila hal ini terjadi, banyak masyarakat yang tidak bisa lagi menonton siaran TV sebagai media hiburan di tengah pandemi. Jadi pemerintah harus mempertimbangkan hal ini,” tandas Rachel menutup pernyataannya. ■ ann/sf

Luqman Hakim Minta Pemda Perkuat *Testing* dan *Tracing*



Wakil Ketua
Komisi II DPR RI
Luqman Hakim.
Foto: Ist/Man

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memperkuat tim khusus *testing* dan *tracing* untuk menekan laju penularan virus Covid-19. Menurutnya, *testing* dan *tracing* bisa direalisasikan dengan *refocusing* anggaran.

“Ingat, *tracing* dan *testing* untuk pengendalian Covid-19 juga membutuhkan dana tidak sedikit di setiap daerah. Tanpa jaminan rasa aman kepada kepala daerah, sulit berharap daerah-daerah bisa bergerak cepat dalam situasi saat ini,” papar Luqman dalam rilis yang diterima *Parlementaria* di Jakarta, Rabu (4/8).

Luqman menyarankan pemerintah mencari formula tafsir hukum atas hak

imunitas yang diatur Pasal 27 ayat (2) dan (3) UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang memberi kekebalan hukum kepada Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan penanganan Covid-19.

Politisi PKB itu juga menyebut berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2020, pimpinan dan pegawai pada empat lembaga negara itu dijamin tidak akan mendapatkan masalah hukum perdata dan pidana, serta tidak bisa digugat ke PTUN. “Menurut saya, harus diupayakan seluruh kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) dan pegawai-pegawainya

diperlakukan sama dengan empat lembaga negara di atas,” ujarnya.

Luqman pun yakin dengan cara seperti itu, maka seluruh pemda akan mantap menjalankan berbagai instruksi pemerintah pusat terkait belanja bansos, pembentukan tim khusus *tracing* dan *testing* Covid-19. Menurutnya dibentuknya tim khusus *tracing* dan *testing* Covid-19 di daerah-daerah diketahui telah membuahkan hasil positif karena penambahan kasus terkonfirmasi Corona, khususnya di luar pulau Jawa dan Bali beberapa waktu terakhir.

Kasus positif Covid-19 di luar Jawa dan Bali sempat meningkat sehingga pemerintah memutuskan menerapkan PPKM Level 4 di 21 provinsi dan 45 kabupaten/kota non Jawa-Bali. Data terbaru pemerintah menyatakan, *testing* di beberapa daerah menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 50 persen. Selain itu, *tracing* di luar Jawa dan Bali juga mengalami peningkatan signifikan dari target yang diberikan oleh pemerintah di mana *tracing* dilakukan oleh para *tracer* dan nantinya akan dilanjutkan dengan *digital tracing*.

“Maka penguatan tim *tracing* dan *testing* memang perlu dilakukan. Pemda bisa meminta bantuan kepada calon-calon perawat untuk mengoptimalkan program ini sehingga laju kasus Corona bisa ditekan semaksimal mungkin,” imbau legislator dapil Jateng VI ini.

Pemda juga diingatkan agar jajarannya terus berkoordinasi dengan petugas TNI/Polri untuk pengaturan terhadap masyarakat selama penerapan PPKM. Petugas penertiban PPKM diharapkan melakukan pendekatan yang tegas tapi humanis.

■ eko/sf

Harus Ada Solusi untuk Persoalan Narkotika di Lapas

Persoalan narkotika di lembaga pemasyarakatan (lapas) Tanah Air masih sering terjadi. Bahkan Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mengatakan persoalan tersebut tak ubahnya sampah yang terus menumpuk selama belasan tahun.

“Hari-hari ini, kita, publik, melihat persoalan utama di lapas adalah persoalan narkotika. Mulai dari bicara masalah penyalahgunaan, penjualan narkotika di dalam, sampai pengendalian peredaran narkotika di luar lapas yang dikendalikan dari dalam lapas,” ujar Herman, baru-baru ini.

Pernyataan tersebut ia ungkapkan saat webinar nasional bertajuk ‘Pembaharuan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia’, yang diselenggarakan oleh Universitas Pelita Harapan (UPH).

Secara tegas Herman menganalogikan persoalan lapas seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA), harus ada solusi untuk pemecahan masalah ini.

“Ini semua semacam sampah persoalan yang tumpuk menumpuk bertahun-tahun, bahkan belasan tahun. Terhitung saya menjadi Anggota Komisi III DPR RI lebih kurang sudah 17 tahun, dan persoalannya tidak pernah berhenti, tidak pernah ada ujungnya,” ungkap politisi PDI-Perjuangan itu.

Menurutnya, ketika sampah seharusnya diproses, dipilah-pilah, dan dipisahkan sehingga dapat didaur ulang, namun hal itu tidak terjadi dalam persoalan lapas. “Demikian juga proses seseorang sampai menghuni lapas. Contohnya di persoalan narkotika yang menyumbang keterisian lapas hingga 50 persen, itu karena semua penegakan hukum berawal dari hulu

”

INI SEMUA SEMACAM SAMPAH PERSOALAN YANG TUMPUK MENUMPUK BERTAHUN-TAHUN

sampai dengan akhir dibuang ke lapas, proses hukumnya harus direformasi, diubah,” kata Herman.

Dia mendapatkan sebuah gambaran bahwasanya proses hukum terkait penyalahgunaan dan penjualan narkotika dari awal (dari tahap penyidikan) ada proses-proses yang harus diubah. Misalnya pengguna dan pengedar narkoba, keduanya adalah dua hal yang sangat berbeda.

“Dalam proses penegakan hukum, penyidikan perkara dari awal, tidak jarang pengguna dan pengedar itu disamaratakan, tergantung arah penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik mau dibawa kemana. Kalau semua mayoritas pengguna disamaratakan dengan pengedar dan semua didorong untuk masuk lapas, bisa kita bayangkan lapasnya menjadi penuh dengan urusan narkotika,” jelasnya.

■ eko/es



Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry. Foto: Jaka/Man

Andi Akmal: Alihkan Subsidi Pupuk jadi Subsidi Harga

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengatakan, sudah saatnya pemerintah melakukan kajian untuk mengalihkan subsidi pupuk menjadi subsidi harga. Subsidi pupuk sudah dimulai sejak rezim Orde Baru, ketika Presiden Soeharto memutuskan subsidi pupuk dengan tujuan swasembada pangan. Tujuan ini tercapai tahun 1984, dan beberapa tahun kemudian hingga Indonesia bebas dari ketergantungan impor pangan pokok.

“Tapi setelah itu, mulai dari Presiden Soeharto di akhir jabatannya, Habibie, Gusdur, Megawati, SBY hingga Jokowi, subsidi pupuk tetap berjalan, tapi tujuannya tak pernah tercapai hingga saat ini. Sudah saatnya mengkaji ulang, untuk ada alternatif mengalihkan subsidi pupuk menjadi subsidi harga,” ucap Akmal dalam keterangan persnya kepada **Parlementaria**, Senin (2/8).

Politisi Fraksi PKS itu menyampaikan, memang dalam mengalihkan sebuah kebijakan mesti ada kajian mendalam yang melibatkan banyak pakar baik akademisi maupun praktisi. Sebab di luar Negeri sudah banyak negara seperti Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa yang memilih subsidi di output daripada di-input.

Untuk itu, legislator asal Sulawesi Selatan II tersebut mendorong agar pemerintah pemerintah mulai mengkaji penerapan mengalihkan alokasi subsidi sektor pertanian dari yang mulanya berbasis input menjadi subsidi *output* demi menekan risiko anjloknya harga produk pertanian pada masa panen yang bisa merugikan petani.

Anggota Komisi IV DPR RI
Andi Akmal Pasluddin.
Foto: Arief/Man



“Ini bisa saja diuji pada satu wilayah kabupaten sentra penghasil produk pertanian, sehingga risiko yang ditimbulkan bila meleset tidak terlalu besar. Tapi bila semakin mendorong peningkatan produk pertanian, menghilangkan dampak penyelewengan karena efektifitas anggaran subsidi yang tepat sasaran, tentu kebijakan ini mesti dapat menjadi alternatif menggantikan subsidi pupuk yang angkanya selalu di atas angka anggaran Kementerian Pertanian itu sendiri,” imbuhnya.

Akmal menambahkan, anggaran Kementan sejak tahun 2015 terus menurun, dari Rp32,72 triliun, di tahun 2016 menjadi Rp27,72 triliun, tahun 2017 Rp24,23 triliun, tahun 2018 Rp 23,90 triliun, tahun 2019 Rp21,71 triliun, tahun 2020 Rp 21,05 triliun, tahun 2021 Rp15,51 triliun, dan kini pagu indikatif tahun 2022 sebesar Rp14,51 triliun.

Terus turunnya anggaran Kementan, juga diikuti turunnya subsidi pupuk, meskipun angka subsidi pupuk terus lebih tinggi dari anggaran Kementan. Ia menyarankan, mesti ada solusi yang tepat dimana tiap tahun gelontoran uang negara untuk pupuk subsidi lebih tepat dan tujuan utama tercapai yakni swasembada pangan.

“Pupuk yang di produksi PIHC seperti sekarang sangat mahal. Sebab utamanya adalah dalam memproduksinya, sangat bergantung pada gas sebagai bahan baku yang mahal. Di samping itu, gas ini kan barang yang tidak dapat terus ada, yang lama-lama akan habis. Sampai saat ini, PIHC belum mampu menjawab tantangan ini, sehingga anggaran pupuk subsidi yang di alokasikan dari APBN puluhan triliun tiap tahun hanya menjawab kebutuhan 34 persen petani seluruh Indonesia,” ungkapny. ■ dep/sf

Komisi VI Dukung Menko Perekonomian Bantu UMKM

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyambut baik upaya pemerintah menangani dampak pandemi Covid-19. Salah satunya, langkah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memberikan bantuan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang totalnya mencapai Rp52,43 triliun.

Politisi yang akrab disapa Demer ini menyatakan, bantuan untuk koperasi sangat bermanfaat karena sesuai dengan tekad pemerintah agar koperasi di masa pandemi bisa bergerak secara produktif dan kreatif. Bantuan untuk koperasi juga dinilai Demer sangat penting karena koperasi memiliki peran aktif dalam menaikkan taraf hidup masyarakat.

“Koperasi dijalankan atas asas kekeluargaan dan merupakan salah satu cara untuk menstabilkan ekonomi suatu negara. Koperasi memang tidak mencari untung besar tapi koperasi memberikan keuntungan bagi banyak anggotanya yang merupakan golongan menengah ke bawah,” ujar Demer dalam rilis yang diterima *Parlementaria*, Rabu (4/8).

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut mengungkapkan, membantu koperasi bukan saja membantu ekonomi masyarakat yang terpuruk akibat pandemi. Namun, membantu koperasi merupakan upaya mendorong banyak anggota masyarakat untuk bangkit bersama-sama.

“Rasa kebersamaan dan senasib sepenanggungan ini yang sangat penting. Dengan begitu, mereka merasa punya semangat dan harapan Bersama untuk bangkit,” tandas Demer sembari mengusulkan untuk penting adanya prinsip gotong-royong sebagai hal



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih. Foto: Oji/Man



**KOPERASI
DIJALANKAN ATAS
ASAS KEKELUARGAAN
DAN MERUPAKAN
SALAH SATU CARA
UNTUK MENSTABILKAN
EKONOMI SUATU
NEGARA. KOPERASI
MEMANG TIDAK
MENCARI UNTUNG
BESAR TAPI KOPERASI
MEMBERIKAN
KEUNTUNGAN BAGI
BANYAK ANGGOTANYA
YANG MERUPAKAN
GOLONGAN
MENENGAH KE BAWAH**

mendasar yang wajib dimiliki dari tiap-tiap koperasi yang ada di Indonesia.

Demer mengingatkan potensi besar yang dimiliki koperasi. Sebab, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM per Desember 2020, jumlah koperasi aktif di Indonesia sebanyak 127.124 unit dengan volume usaha sebesar Rp174 triliun dan jumlah anggota sekitar 25 juta orang. Demer menegaskan, membantu koperasi adalah membantu banyak orang dengan akumulasi modal yang juga besar.

Legislator dapil Bali itu menutup pernyataannya dengan menagih janji Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang sudah menargetkan pertumbuhan 500 unit koperasi modern sebanyak 500 unit koperasi. “Meningat, target tersebut sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024,” pungkas Demer. ■ pun/es

Nasim Khan: PPKM, Momen Terbaik Perbaiki Bangsa

Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sudah dua kali diperpanjang menjadi level 4 hingga 9 Agustus mendatang, harus dijadikan momentum perbaikan bangsa. Tidak hanya di sektor kesehatan, tapi juga sosial dan ekonomi.

Dalam wawancaranya via *Whatsapp*, Selasa (3/8), Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mengatakan, semua komponen bangsa harus kian peka terhadap kondisi terkini seiring pemberlakuan PPKM untuk mengatasi pandemi Covid-19. “Seharusnya momen ini semakin membuat kita semua sensitif juga peka untuk mulai berbuat yang terbaik atas kondisi bangsa.”

Hanya saja fakta di lapangan kerap tidak sejalan dengan harapannya. Nasim menyebut, bantuan sosial (Bansos) memang sudah berjalan. Tapi, sistemnya berupa data penerima tidak pernah beres dari dulu sebelum pandemi sampai sekarang. “Terbukti selama ini kita lihat

permasalahan bantuan PKH maupun Bansos tidak pernah beres. Seharusnya semua bersinergi. Apalagi, ada aparat desa sebagai ujung tombak yang selama ini kurang diperankan,” ucap politisi Fraksi PKB ini.

Padahal, sambung Nasim, aparat desa sangat paham dengan kondisi masyarakatnya bila diberdayakan untuk mendata para penerima Bansos. Masalahnya, selalu saja ada oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi dan golongan.

”

SEHARUSNYA MOMEN INI SEMAKIN MEMBUAT KITA SEMUA SENSITIF JUGA PEKA UNTUK MULAI BERBUAT YANG TERBAIK ATAS KONDISI BANGSA.” HANYA SAJA FAKTA DI LAPANGAN KERAP TIDAK SEJALAN DENGAN HARAPANNYA.

“Fakta dan data yang kita serap dari dapil, lalu kami sampaikan ke semua instansi, kementerian, dan pemda. Susah untuk mendapat perhatian, karena semua saling lempar kebijakan, baik pemda maupun pemerintah pusat,” kilahnya. ■ mh/sf

Anggota Komisi VI DPR RI
Nasim Khan. Foto: Ojji/Man



Endang Maria Astuti: Bansos Harus Serius Diperhatikan

Kebijakan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 9 Agustus oleh pemerintah, masih menyisakan PR (pekerjaan rumah) besar pada masalah bantuan sosial (Bansos). Program ini dinilai banyak tidak tepat sasaran dan tidak dievaluasi secara memadai.

Diwawancarai via *Whatsapp*, Senin (2/8), Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti mengemukakan

”

SELAMA PPKM MESTINYA BANSOS DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK DAN YANG SEDANG MENJALANI ISOLASI MANDIRI. HINGGA SAAT INI, TIDAK SEDIKIT MASYARAKAT YANG MESTINYA BERHAK MENERIMA TETAP SAJA TIDAK MENERIMA BANSOS. ORANG YANG TIDAK PUNYA PEKERJAAN BERTAHUN-TAHUN, KARENA SAKIT ATAU TIDAK BISA BEKERJA LAGI TIDAK DAPAT BANSOS.

pandangannya bahwa dari hasil pengamatannya ke tengah masyarakat, Bansos masih jadi PR besar yang menyertai kebijakan PPKM. Sudah jadi



Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti. Foto: Jaka/Man

keniscayaan masyarakat terdampak harus mendapat Bansos.

“Selama PPKM mestinya Bansos diberikan kepada masyarakat terdampak dan yang sedang menjalani isolasi mandiri. Hingga saat ini, tidak sedikit masyarakat yang mestinya berhak menerima tetap saja tidak menerima Bansos. Orang yang tidak punya pekerjaan bertahun-tahun, karena sakit atau tidak bisa bekerja lagi tidak dapat Bansos. Sebaliknya, yang mampu dan bahkan istri Kapolsek mendapat Bansos,” ungkap politisi Partai Golkar itu.

Endang menambahkan, orang-orang yang secara ekonomi mampu, ternyata masih terima Bansos. Ia juga bercerita tentang keluarga yang sudah pindah domisili selama empat tahun, dapat Bansos di domisili lamanya. Bahkan, di domisili barunya tetap dapat Bansos juga. Ini semua fakta yang ditemukan

di lapangan saat PPKM diberlakukan. Evaluasi penyaluran Bansos pun harus jadi agenda penting ke depan.

Masih menurut Endang, ketika PPKM diperpanjang, banyak pelaku UMKM kesulitan mencari penghidupan, karena akses ekonomi tertutup. Legislator dapil Jawa Tengah IV itu menuturkan, toko dan penjual sayur kebutuhan harian banyak ditutup. Mau belanja pun, katanya, tidak punya uang. Yang punya kebun sayur pun tidak bisa menjual hasil budi daya sayurannya, karena semua akses jalan ditutup.

“Harga barang menjadi mahal. Lalu, pengaruhnya bagi yang sedang isoman mengeluh, karena masyarakat di lingkungannya tidak bisa bantu memberi makan. Begitulah kenyataan yang dilihat saat mengunjungi masyarakat di masa reses,” imbuh Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini. ■mh/sf

Tanpa Peningkatan *Testing-Tracing*, Penanganan Pandemi Tak Akan Optimal



Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene. Foto: Arief/Man

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menegaskan tanpa ada peningkatan pengetesan (*testing*) dan pelacakan (*tracing*) Covid-19 di masyarakat, maka penanganan pandemi Covid-19 tidak akan optimal. Menurut Felly, kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat mulai dari PSBB pada awal pandemi hingga PPKM Darurat saat ini tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan *testing-tracing* yang masif.

"*Testing* dan *tracing* ini mutlak harus dilakukan. Kami tidak henti-hentinya ingatkan pemerintah agar peningkatan *testing* ini sebagai prasyarat agar penanganan pandemi bisa lebih efektif lagi. Kami sudah adakan, PPKM, PSBB, dan sebagainya, tapi kalau tidak dibarengi dengan *testing* dan *tracing* saya kira

tidak akan maksimal," tegas Felly dalam webinar bertema "Evaluasi PPKM Darurat dalam Perspektif Kesehatan, Sosial, Ekonomi, dan Hukum" yang diselenggarakan jajaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Kamis (29/7).

Felly menyebut Indonesia hanya melakukan tes kepada 66.807 orang per 1 juta orang, di mana angka tersebut sangat jauh dibandingkan dengan Malaysia yang sudah melakukan tes kepada 417.767 orang per 1 juta orang. Juga dengan Thailand yang melakukan tes sebanyak 116.190 orang per 1 juta orang.

"Kami memantau *positivity rate* harian dan seminggu terakhir ini, *positivity rate* khususnya PCR yang terus di atas angka 40 persen bahkan mencapai 45,40 persen per tanggal 27 Juli 2021. Angka ini menunjukkan

saat ini ada penularan yang tinggi di masyarakat," papar politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Karena itu, Felly menegaskan Komisi IX DPR RI secara konsisten terus memberikan desakan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan RI, untuk secara serius meningkatkan *testing* dan *tracing* tersebut. Felly meminta adanya kerja-kerja yang betul terstruktur penanganan pandemi tersebut, sehingga kasus Covid-19 tidak berkepanjangan dan ekonomi Indonesia segera pulih.

Di sisi lain, Felly juga berharap perluasan cakupan *testing-tracing* tersebut juga diimbangi dengan metode lain selain RT-PCR, yaitu metode *Nucleic Acid Amplification Test* (NAAT) yang juga dapat digunakan untuk mendeteksi RNA Sars Cov-2. Diketahui, Metode NAAT ini telah termuat dalam panduan tata laksana pemeriksaan Covid-19 yang dikeluarkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat dan Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi.

"Sekali lagi kami sampaikan tanpa ada peningkatan *testing-tracing*, maka penanganan pandemi tidak akan optimal. Karena kita tidak mengetahui secara riil jumlah kasus positif dan kebijakan PPKM tidak akan bisa berjalan efektif. Kami juga berharap adanya kesadaran masyarakat untuk turut aktif melakukan hal itu secara berkesinambungan dan konsisten," tegas legislator daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Utara itu. ■ rdn/sf

Elva Hartati: Perpanjangan PPKM Perlu Didukung

Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati menegaskan, kebijakan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 9 Agustus mendatang, perlu mendapat dukungan publik. Pasalnya, kasus Covid-19 masih tinggi per 2 Agustus

lalu yang mencapai 523.164 orang. “Kami terus mendorong seluruh sistem kesehatan terus bersiap dengan pemerintah memastikan tenaga kesehatan kita dijamin kesejahteraan dan keselamatannya. Pasokan obat, alat kesehatan dan oksigen harus dipastikan tersedia, sehingga mereka yang membutuhkan perawatan bisa sembuh,” kata Elva saat diwawancara *Parlementaria* via *Whatsapp*, Selasa (3/8).

Yang tidak kalah penting, sebut politisi PDI-Perjuangan itu, 80 persen kasus aktif yang melakukan isolasi mandiri (isoman) juga dapat terus diperhatikan kesehatannya dengan pemantauan rutin. Misalnya, dengan pemberian vitamin dan obat yang diperlukan. Penyediaan obat gratis bagi isoman dan

telemedicine terus dilaksanakan dan diperbaiki pelaksanaannya.

Dikemukakan Elva, laporan di daerah yang menerapkan PPKM Level 4, *Bed Occupancy Rate* (BOR) mengalami penurunan di sejumlah rumah sakit. Namun, pemerintah pusat dan daerah masih harus diingatkan bahwa *positivity rate* masih sangat tinggi, yaitu masih di atas 20 persen. Sementara rekomendasi WHO, *positivity rate*-nya harus di bawah 5 persen agar pandemi Covid-19 ini bisa dikendalikan.

“Untuk itu, kami terus mendorong peningkatan *testing*, *tracing*, dan isolasi. Mengingat *testing* kita masih jauh dari target pemerintah sendiri yang sebesar 400 ribu per hari. *Testing* ini sangat penting untuk mengetahui secara riil kasus positif di masyarakat dan ini merupakan langkah awal agar pandemi terkendali,” tutup legislator asal Bengkulu tersebut. ■ mh/sf

Anggota Komisi IX DPR RI
Elva Hartati. Foto: Jaka/Man

”

KAMI TERUS MENDORONG SELURUH SISTEM KESEHATAN TERUS BERSIAP DENGAN PEMERINTAH MEMASTIKAN TENAGA KESEHATAN KITA DIJAMIN KESEJAHTERAAN DAN KESELAMATANNYA. PASOKAN OBAT, ALAT KESEHATAN DAN OKSIGEN HARUS DIPASTIKAN TERSEDIA,

Ganda Putri Raih Emas di Olimpiade, Hetifah Dukung Jaminan Sosial Hari Tua Bagi Atlet

Indonesia resmi membawa pulang emas pada pertandingan bulu tangkis ganda putri Olimpiade Tokyo. Greysia Polii/Apriyani Rahayu bertemu Chen/Jia pasangan dari China yang merupakan rival mereka selama bertahun-tahun. Setelah berjuang dengan sengit, *smash* terakhir pasangan Greysia/Apriyani akhirnya berhasil memberikan kemenangan. Mereka mengalahkan pasangan Chen/Jia dengan skor akhir 21-15.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan rasa haru dan bangga atas prestasi yang ditorehkan Greysia/Apriyani. "Pertandingan dan prestasi yang

luar biasa. Saya sudah ngefans dengan Greysia/Apriyani sejak Sea Games lalu. Ternyata sekarang mereka kembali mengharumkan nama Indonesia di level lebih besar," ujar politisi Fraksi Partai Golkar itu melalui keterangan pers yang diterima **Parlementaria**, Senin (2/8).

Lebih lanjut, Hetifah juga memuji kerja keras berbagai pihak dalam mencetak

prestasi bulu tangkis. "Dari era Susi Susanti, Indonesia sudah langganan memenangkan berbagai kejuaraan bulu tangkis. Tentu saja atlet berprestasi tidak dicetak secara kilat, melainkan perjuangan bertahun-tahun dengan dukungan berbagai pihak. Saya acungkan jempol untuk sinergi PB Bulu Tangkis, KONI, Kemenpora, serta CSR berbagai swasta yang mendukung prestasi atlet kita," tambah legislator dapil Kalimantan Timur tersebut.

Hetifah juga menjamin penghargaan bagi atlet berprestasi dalam revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) Nomor 3 tahun 2005 yang baru. "Salah satu poin yang sangat ditekankan dalam RUU SKN adalah penghargaan serta jaminan sosial hari tua bagi atlet berprestasi. Atlet-atlet seperti Greysia/Apriyani telah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Sudah sepatutnya negara menjamin kesejahteraan hari tua mereka," pungkasnya. ■ mm/sf

”

**ATLET BERPRESTASI
TIDAK DICETAK SECARA
KILAT, MELAINKAN
PERJUANGAN
BERTAHUN-TAHUN
DENGAN DUKUNGAN
BERBAGAI PIHAK**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Hetifah Sjaifudian. Foto: Azka/Man



Pemerintah Harus Revisi Pertumbuhan Ekonomi



Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir. Foto: Jaka/Man

”

TARGET INI DIREVISI KARENA POSTUR APBN PASTI AKAN MENGALAMI PENYESUAIAN DI BEBERAPA POS MATA ANGGARAN. INI PENTING DILAKUKAN AGAR APBN TETAP TERJAGA DARI SISI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITASNYA SUPAYA KREDIBLE

Postur APBN terus mengalami penyesuaian pada setiap mata anggarannya. Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengimbau pemerintah merevisi angka pertumbuhan ekonomi 2021 yang dipatok sebesar 5 persen. Bank Indonesia (BI) sudah merevisi proyeksi pertumbuhan sebanyak tiga kali.

“Pemerintah masih bertahan dengan proyeksi sesuai APBN yaitu 5 persen. Seharusnya target ini direvisi karena postur APBN pasti akan mengalami penyesuaian di beberapa pos mata anggaran. Ini penting dilakukan agar APBN tetap terjaga dari sisi transparansi dan akuntabilitasnya supaya *kredibile*,” kata Hafisz dalam keterangan persnya kepada **Parlementaria**, Sabtu (31/7).

Dikemukakan Hafisz, BI telah melakukan tiga kali revisi atas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 dengan menurunkan angka pertumbuhan. Pertama, pada 25 Februari, angkanya

4,3 persen-5,3 persen. Direvisi menjadi 4,8 persen. Kedua, pada 23 April angkanya 4,1 persen-5,1 persen. Direvisi menjadi 4,6 persen. Dan ketiga, 23 Juli angkanya 3,5 persen-4,3 persen. Direvisi menjadi 3,9 persen. Semua revisinya mengambil titik tengah.

“Sementara itu, Dana Moneter Internasional (IMF) juga telah melakukan koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 3,9 persen tahun 2021. Ini didapat dari Laporan *World Economic Outlook* edisi Juni 2021. Hal ini hampir mirip dengan koreksi BI yang terakhir, yaitu koreksi tanggal 23 Juli 2021,” ungkap Hafisz.

Bahkan, mengutip pandangan Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies, dengan tekanan mobilitas dan pembatasan sosial, maka proyeksi ekonomi RI bisa saja tidak akan tumbuh di angka 3,9 persen, melainkan hanya tumbuh di kisaran -0,5 persen hingga 2 persen

saja. Ini tentu sangat mengkhawatirkan. Sudah seharusnya pemerintah menjadikan penanganan pandemi sebagai titik ukur apakah bisa keluar dari krisis ini.

“Meminjam istilah Cicero filsuf Italia, *‘Salus populi suprema lex esto’*; keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara,” tutur legislator dapil Sumsel I itu. Apalagi, Indonesia baru saja dinyatakan turun kelas oleh Bank Dunia dari kelompok negara berpendapatan menengah atas (*upper-middle income*) menjadi negara berpendapatan menengah bawah (*lower-middle income*). Ini akan menambah daftar PR pemerintah untuk dapat naik kelas kembali.

“Diperlukan waktu dan kinerja yang lebih berat lagi untuk mencapai *Gross National Income* (GNI) per kapita sebesar 4.090 dolar AS, untuk dapat naik kelas kembali menjadi Negara Berpendapatan Menengah Atas (*upper-middle income*),” tutup politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. ■ mh/sf

Sekjen DPR: Ada Perubahan Paradigma Setjen

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyampaikan, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI kini sedang berbenah diri menyempurnakan organisasi Kesetjenan. Ada paradigma yang berubah dengan tujuan memudahkan akses publik sekaligus menjadikan semua struktur dan aparaturnya bekerja lebih lincah.

“Perubahan yang paling utama adalah arah reformasi birokrasi agar organisasi ini bisa lebih lincah dalam pelayanan. Organisasi Setjen ini ada dua pelanggannya, dewan dan internal Setjen. Dengan tata organisasi baru ini kita menginginkan semua fungsi-fungsi itu lebih spesifik,” kata Indra usai memimpin

rapat Sosialisasi Peraturan Sekjen DPR Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Setjen DPR, di Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (4/8).

Indra lalu mencontohkan perubahan organisasi tersebut. Misalnya, dulu ada Biro Perencanaan dan Keuangan. Kini berubah menjadi dua biro, yaitu Biro Keuangan dan Biro Perencanaan dan Organisasi. Di sinilah letak perubahan itu. Beberapa biro lainnya juga ada yang unit kerjanya dipecah.

“Tujuannya agar organisasi bisa lebih lincah dalam pengambilan keputusan. Begitu juga dengan paradigma Biro Kepegawaian saat ini berubah jadi Biro Sumber Daya Manusia Aparatur. Ke depan Biro ini tidak hanya

mengadministrasi pegawai, tapi juga akan memberdayakan sumber daya aparatur lebih baik lagi,” jelas Indra.

Indra melanjutkan, memperkuat SDM di hulu menjadi tantangan ke depan. Jadi yang disebut perubahan paradigma itu adalah organisasi Setjen lebih lincah supaya layanan kepada Dewan juga lebih maksimal.

“Kita juga sedang evaluasi untuk penyesuaian-penyesuaian pada lini mana yang nanti akan berubah nomenklatur menjadi fungsional. Kenapa berubah jadi fungsional? Agar pada lini tersebut hierarki bekerjanya lebih terbuka. Tidak terbatas pada struktural, tapi juga bisa cepat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan,” imbuhnya.

Perubahan struktur organisasi Kesetjenan ini mengikuti pula konsep parlemen modern. Apalagi, ada Perpres Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang melandasi perubahan tersebut. “Ke depan, akan merubah Renstra (Rencana Strategis) kita. Renstra itu yang akan menyesuaikan dengan fungsi-fungsi dan itu akan segera kita evaluasi,” tambah Indra. ■ mh/sf



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memimpin rapat Sosialisasi Peraturan Sekjen DPR tentang Organisasi dan Tata Kelola Setjen DPR. Foto: Oji/Man

Dukung Parlemen Modern, Setjen DPR Gelar Sosialisasi Kearsipan

Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Jenderal DPR RI Suratna mengungkapkan, dalam rangka mewujudkan parlemen modern, Setjen DPR RI sebagai *supporting system* atas pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI perlu memberikan dukungan secara maksimal dengan mewujudkan 3 ciri parlemen modern, yakni transparan, pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan fungsi representasi.

“Untuk hal tersebut Setjen DPR sebagai unsur pendukung, *supporting system* atas pelaksanaan fungsi DPR RI tersebut, perlu memberikan dukungan secara maksimal,” ungkap Ratno, sapaan akrab Suratna saat membuka kegiatan Sosialisasi Pedoman Kearsipan DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (3/8).

Menurutnya, hal utama dalam mendukung DPR RI menjalankan fungsi representasinya adalah ketersediaan data dan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja Anggota Dewan sebagai wakil rakyat, maupun ketersediaan data dan informasi yang sesuai dengan bidang masalah yang dibutuhkan secara lengkap, efektif dan efisien yang diperlukan oleh masyarakat.

Oleh sebab itu, kata Ratno, regulasi terkait dengan tata kelola arsip yang menjadi sebuah satu kesatuan sistem meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi menjadi aspek penting yang bertujuan untuk membentuk keseragaman dalam penciptaan, penggunaan, pemeliharaan pelayanan dan penyusutan arsip juga

sebagai bentuk ketaatan terhadap regulasi yang disusun.

“Maka ancaman terhadap hilangnya arsip di DPR RI yang berisikan rekam jejak organisasi serta kegiatan kedewanan yang merupakan arsip vital dan aset nasional tentunya tidak akan terjadi,” tambah Ratno.

Lebih lanjut, dalam kegiatan sosialisasi yang bertujuan menciptakan

Peraturan Arsip Republik Indonesia.

“Untuk itu, diperlukan regulasi dalam satu kesatuan yang telah disusun Bagian Arsip, yang pertama adalah pedoman tata naskah dinas, kedua klasifikasi arsip, ketiga klasifikasi keamanan dan arsip dinamis, jadwal resensi arsip dan yang kelima adalah pedoman alih media, serta yang terakhir, tata naskah dinas elektronik,” ungkapnya.



Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Jenderal DPR RI Suratna (ke dua dari kiri) saat membuka kegiatan Sosialisasi Pedoman Kearsipan DPR RI. Foto: Runi/Man

tata kelola arsip menuju sadar dan tertib arsip ini, Ratno menambahkan, bahwa Bagian Arsip DPR RI telah menyusun berbagai regulasi untuk menyempurnakan dan memutakhirkan peraturan yang ada disesuaikan dengan dinamika organisasi dan peraturan kearsipan baik UU, Peraturan Pemerintah maupun

Terakhir, dalam sambutannya, Ratno juga memberikan apresiasi kepada pegiat arsip dan para arsiparis yang telah mempersiapkan kegiatan sosialisasi kearsipan dan telah menyusun regulasi kearsipan tersebut guna mewujudkan keselarasan dalam administrasi persuratan dan penyusunan naskah dinas di DPR RI. ■ bia/sf



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memberikan cenderamata kepada pegawai Setjen DPR RI yang memasuki masa purnabakti. Foto: Andri/Man

Setjen DPR Lepas Lima Pegawai Masuki Masa Pensiun

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan loyalitas kepada lima Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa purnabakti terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021.

“Kami atas nama keluarga besar Sekretariat Jenderal mengucapkan selamat memasuki masa purna bakti kepada ibu/bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan loyalitas yang diberikan selama menjalankan tugas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR,” kata Indra.

Lebih lanjut, dalam sambutannya saat melepas pegawai yang memasuki masa purnabakti di Gedung Nusantara

II, Senayan, Jakarta, Jumat (30/7), Indra berharap pengabdian dan loyalitas yang diberikan selama ini baik berupa tenaga, pikiran dan ide dapat menjadi amal bakti dan mendapat pahala yang setimpal dari Tuhan YME.

“Kami berharap ibu/bapak yang akan memasuki masa pensiun dapat menyambut dan menjalani masa pensiun ini dengan penuh rasa kebahagiaan dan suka cita karena kita tahu bagi PNS yang bisa memasuki masa pensiun merupakan capaian yang paling tinggi,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Juliasih yang juga memasuki masa purna bakti mengungkapkan rasa syukur terhadap perjalanan panjang yang telah dijalani

selama mengabdikan di Sekretariat Jenderal DPR RI.

“Perjalanan karier di akhir masa tugas ini tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan kami atas bimbingan, kepercayaan dan kesempatannya. Kepada rekan kerja atas kerjasama, bantuan dan kebersamaannya,” ungkap Juliasih mewakili rekan-rekannya.

Pegawai yang memasuki masa purna bakti selain Juliasih di antaranya adalah Sri Lestari (Kepala Bagian Perjalanan), Sukma Winata (Arsiparis Ahli Madya di Biro Humas dan Protokol), Abdul Anas (Analisis Keamanan di Bagian Pengamanan Dalam) dan Sunarno (Penyusun Kesekretariatan Fraksi di Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi). ■ [bia/sf](#)

Satgas Lawan Covid DPR Dukung Kemudahan Izin Masuk Produk Alkes



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Tim Satgas Covid-19 DPR RI saat lawatannya ke Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara. Foto: Rumi/Man

Satgas Lawan Covid-19 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendukung kemudahan birokrasi izin masuk untuk alat-alat kesehatan yang masuk ke Indonesia. Dalam urusan pandemi seperti ini, menurut Dasco birokrasi untuk alkes harus dapat dipangkas karena masyarakat dan tenaga kesehatan membutuhkannya secara cepat.

Hal tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani dan Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Priok Dwi Teguh dalam lawatannya ke Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jakarta, Selasa (3/8). Dasco sendiri mengapresiasi Bea Cukai Tanjung Priok yang telah mengutamakan dan memudahkan izin produk-produk alkes masuk ke Indonesia.

“Kami berupaya melakukan integrasi dan sinkronisasi mengenai barang-barang yang masuk. Sehingga kami apresiasi kepada pihak bea cukai yang telah memberikan kemudahan-kemudahan peraturan untuk memasukkan barang kebutuhan untuk Covid seperti alat kesehatan, obat-obatan, dan tabung gas,” jelas Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan itu.

Politisi Partai Gerindra itu menerangkan, aturan yang dimiliki bea cukai saat ini telah mempermudah seluruh pihak yang ingin berpartisipasi melawan pandemi Covid-19, sehingga alat-alat yang diperuntukkan pada kesehatan bisa masuk dengan mudah dan dalam tempo cepat, sehingga bisa langsung dieksekusi ke sasaran daerah impor masing-masing.

“Sehingga kami harapkan hal ini terus berlangsung kepada bea cukai yang ada di garis depan. Kami berikan apresiasi juga kepada para petugas yang tidak kenal lelah, bahkan kami lihat loketnya buka 24 jam setiap hari *non-stop*. Kami harapkan pelayanan agar terus bertambah baik,” tandas Dasco kepada jajaran bea cukai.

Sementara Dirjen Bea Cukai Askolani mengklaim pelayanan *online* di Bea Cukai saat ini sudah dapat dinikmati selama 24 jam setiap hari. Hal ini dianggapnya dapat memfasilitasi percepatan pemasukan alkes. “Di sini utamanya tabung dan obat-obatan, satu lagi yang masif adalah vaksin masuk dari Soetta (Bandara Soekarno-Hatta),” imbuhnya.

Kalau dalam kondisi normal, ia mengungkapkan, alat-alat kesehatan ini prioritasnya sama dengan produk lain seperti buah, sayuran, peralatan, dan otomotif. Sehingga menurutnya hal ini tidak menjadi keutamaan seperti kondisi pandemi sekarang.

“Tetapi kami sekarang beraksi. Pertama kamu dapat info bahwa itu alkes, langsung kita tarik, yang dulunya mungkin urutan 20, bisa langsung kami taruh di urutan pertama untuk diselesaikan. Itu mungkin langkah aktif yang kami lakukan di seluruh pelabuhan dan bandara untuk semua alat kesehatan, obat-obatan, dan tentu vaksin,” tutup Askolani.

Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Anggota Tim Satgas Lawan Covid lainnya, yakni Melkiades Laka Lena (F-PG), Wihadi Wiyanto, Habiburrahman (F-Gerindra), serta Charles Melkiansyah (F-NasDem). ■ **er/es**



Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI serta Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN TA 2022

Senin, 16 Agustus 2021



STREAMING

ONLINE

LIVE



link
s.id/STSB-RAPBN-2021

www.dpr.go.id,
TVR PARLEMEN, dan
Kunjungi Akun Resmi
Media Sosial DPR RI



www.dpr.go.id



TVR PARLEMEN



DPR RI



DPR RI



@DPR_RI



@DPR_RI



@DPR_RI



DPR RI

www.dpr.go.id



@DPR_RI



DPR RI